

**KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DALAM PENERAPAN PERATURAN
BUPATI NO 17 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN SOLOK**

EXECUTIVE SUMMARY



Diajukan oleh :

AULIYA RAHMAN

2010012111285

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNGHATTA

2025

Reg No: 19/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg No: 19/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Auliya Rahman

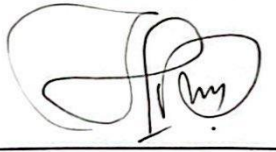
Npm : 2010012111285

Bagian : Hukum Tata Negara

**Judul Skripsi : Kebijakan Dinas Sosial Dalam Penerapan Peraturan Bupati
No 17 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting
Di Kabupaten Solok**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Nurbeti, S.H., M.H. (Pembimbing)



**THE ROLE OF THE SOCIAL SERVICE IN IMPLEMENTING REGENT
REGULATION NO. 17 OF 2023 ON STUNTING REDUCTION
ACCELERATION IN SOLOK REGENCY**

Auliya Rahman¹, Nurbeti¹

Law Study Program, Faculty Of Law, University Bung Hatta

Email : rahm8690@gmail.com

ABSTRACT

Stunting is a public health issue that affects the quality of human resources and has become a national priority. In 2019, Solok Regency ranked third for the highest stunting rate in West Sumatra. In 2020, Solok Regency ranked fourth in the performance assessment of stunting-priority regions. The research problems are formulated as follows: (1) What is the role of the Solok Regency Social Service in implementing Regent Regulation No. 17 of 2023? (2) What challenges does the Social Service face in carrying out this policy? and (3) What efforts are undertaken to overcome these challenges? This study employs a sociological legal research method. Data sources consist of primary data (interviews) and secondary data; data collection techniques include document studies and interviews; while data analysis is conducted using a qualitative method. The results of the study show: (1) The role of the Social Service includes the distribution of Non-Cash Food Assistance (BPNT), provision of supplementary feeding (PMT), the Family Hope Program (PKH), nutrition education, and cross-sectoral coordination; (2) The challenges faced include budget limitations, lack of human resources, inaccurate data, low nutrition literacy, and geographical barriers; (3) The efforts made include strengthening human resource capacity, data integration, establishment of coordination forums, culturally-based education, and partnerships with various stakeholders.

Keywords: Stunting, Social Service, Regent Regulation No. 17 of 2023

1.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stunting masih menjadi masalah serius di Indonesia dan ditetapkan sebagai program prioritas nasional sejak 2017. Kabupaten Solok sempat

mencatat prevalensi tertinggi di Sumatera Barat, yaitu 40,1%. Untuk menanganinya, diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 dengan Dinas Sosial berperan dalam bantuan

sosial, edukasi gizi, dan koordinasi lintas sektor.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis maka penulis melakukan penelitian dengan judul

“KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DALAM PENERAPAN PERATURAN BUPATI NO 17 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN SOLOK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Dinas Sosial Kabupaten Solok Dalam Penerapan Peraturan Bupati No 17 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting ?
2. Apakah Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Solok Dalam Menangani Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Solok ?
3. Bagaimanakah Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam menangani Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Solok ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa peranan Dinas Sosial dalam Penerapan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Solok

2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang di hadapi Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Solok
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam mengatasi kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Solok Dalam Menangani kasus Stunting di Kabupaten Solok

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis

B. Sumber Data

- a. Data Primer : Wawancara Dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok
- b. Data Sekunder: Data yang didapatkan dari dokumen- dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah melalui studi dokumen dan wawancara.

D. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan Teknik Analisa data secara kualitatif.

III.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Dinas Sosial Kabupaten Solok Dalam Penerapan Peraturan Bupati No 17 Tahun

2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Pada dasarnya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan merdeka dan memiliki hak asasi yang tidak dapat dihilangkan oleh siapa pun. Kemerdekaan anak merupakan bagian dari hak fundamental yang wajib dijaga, dihormati, dan dipenuhi. Dalam hal ini, negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa anak memperoleh hak atas hidup serta hak atas perlindungan secara menyeluruh. Pemenuhan dan perluasan hak-hak tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

B.Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Solok Dalam Menangani Percepatan Penurunan Stunting

Adapun kendala-kendala yang ditemui oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok sebagai berikut :

- 1.Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia
- 2.Data Penerima Manfaat yang tidak Akurat
- 3.Kondusi Lintas Sektor Yang Lemah
- 4.Rendahnya Literasi Masyarakat Tentang Stunting
- 5.Akses Geografis dan Infrastruktur yang Terbatas

6.Strategi Komunikasi yang Belum Efektif dan Menjangkau Semua Kalangan

C.Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam menangani Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Solok

Upaya-upaya sebagai berikut :

- 1.Penguatan Kapasitas dan Pemanfaatan SDM Secara Optimal
- 2.Pengembangan Sistem Informasi dan Perbaikan Basis Data
- 3.Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi Antar Sektor
- 4.Edukasi Berbasis Kearifan Lokal dan Kemitraan Komunitas
- 5.Peningkatan Aksesibilitas Wilayah Terpencil melalui Kemitraan

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peranan Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam Penerapan Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting Dinas Sosial Kabupaten Solok memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023. Peranan tersebut dijalankan melalui berbagai program sosial yang berfokus pada perbaikan gizi keluarga miskin, edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor.

2. Kendala-kendala yang Dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam Menangani Percepatan Penurunan Stunting

Dalam pelaksanaan peranannya, Dinas Sosial Kabupaten Solok menghadapi berbagai kendala, dihadapi meliputi:

- a) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang menyebabkan pelaksanaan program tidak berjalan optimal di seluruh wilayah kabupaten.
- b) Ketidakakuratan data penerima manfaat, yang menyebabkan distribusi bantuan tidak tepat sasaran.
- c) Lemahnya koordinasi lintas sektor antara Dinas Sosial dan OPD lain, yang berdampak pada tumpang tindih atau kekosongan wilayah intervensi.

3. Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Solok

- a) Untuk mengatasi kendala internal, Dinas Sosial melakukan penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis dan pelibatan relawan, serta membangun sistem data terintegrasi antar instansi dengan memanfaatkan teknologi digital.
- b) Untuk mengatasi kendala eksternal, Dinas Sosial memperkuat koordinasi dengan OPD terkait melalui forum lintas sektor, melakukan edukasi berbasis kearifan lokal dengan melibatkan

tokoh masyarakat dan pemuka agama, serta menjalin kemitraan dengan lembaga swasta dan organisasi kemanusiaan guna meningkatkan aksesibilitas ke wilayah terpencil menggunakan armada logistik dan teknologi

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Solok diharapkan dapat meningkatkan alokasi anggaran khusus untuk program percepatan penurunan stunting, terutama dalam mendukung operasional Dinas Sosial dan memperluas jangkauan intervensi di wilayah-wilayah terpencil.
2. Dinas Sosial perlu mempercepat pembangunan sistem data penerima manfaat yang terintegrasi dan berbasis digital, agar penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran dan efisien.
3. Diperlukan penguatan strategi komunikasi publik yang lebih inklusif dan berbasis komunitas lokal, agar informasi terkait stunting dan layanan pemerintah dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat, khususnya di daerah yang memiliki tingkat literasi rendah.
4. Sinergi lintas sektor harus terus diperkuat, baik melalui forum koordinasi reguler antar-OPD, maupun kerja sama dengan sektor swasta, organisasi sosial, dan media

lokal, agar penanganan stunting menjadi tanggung jawab bersama.

5. Perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan rutin kepada petugas lapangan, kader desa, dan relawan, agar mereka dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mengedukasi masyarakat dan mendampingi keluarga berisiko stunting.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

A.Junaedi Karso dkk, 2021, *Hubungan Pemerintah Pusat & Daerah*, PT. Samudra Biru, Cetakan Pertama, Yogyakarta

Ahmad Redi dkk, 2019, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, PT. Sinar Grafika. Cetakan Pertama, Jawa Timur

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

c. Sumber Lain

Asmaripa Ainy, Yuni Masrona, 2021, "Implementasi Program Inovasi Payung Penting dan Gaya Puspaku di Puskesmas

Pakem, Kabupaten Sleman", Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia

Antonius Supriyanto, Lina Miftahul Jannah, 2022, jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Hilda Rossietta, M.Comm, Ali Muktiyanto, Geraldina, 2017, "Tata Kelola sosial dan Publik". , Jurnal Pustaka

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Nurbeti, S.H., M.H., Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik, serta kepada pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

